

Pelayanan Publik sebagai Kunci Penanganan Stunting di Indonesia

Citra Novia Dewi^{1✉}, Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng²

^{1,2} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstrak

Stunting masih menjadi salah satu masalah kesehatan paling serius di Indonesia. Bukan hanya karena tingginya angka kasus yang mencapai 21,6% pada tahun 2022 tetapi juga karena dampak jangka panjangnya terhadap kualitas hidup anak-anak Indonesia di masa depan. Stunting tidak hanya membuat anak lebih pendek dari seharusnya, tapi juga bisa menghambat perkembangan otak, menurunkan kemampuan belajar, hingga mengurangi produktivitas saat dewasa nanti. Dalam konteks ini, pelayanan publik memegang peran penting. Melalui kajian literatur ini, penulis mencoba melihat lebih dalam bagaimana pelayanan public dari layanan kesehatan dasar, edukasi gizi, hingga sanitasi berkontribusi dalam upaya penanggulangan stunting. Hasilnya menunjukkan bahwa tantangan di lapangan masih besar, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya edukasi yang merata, hingga koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Namun, banyak juga peluang yang bisa dimaksimalkan, seperti penguatan SDM lokal, digitalisasi layanan, dan pelibatan aktif masyarakat. Belajar dari negara lain seperti Bolivia, Korea Utara, dan Swedia, Indonesia bisa mengadaptasi berbagai strategi sukses mereka dengan pendekatan yang sesuai konteks lokal. Pada akhirnya, pelayanan publik yang kuat, inklusif, dan responsif menjadi kunci untuk menurunkan angka stunting dan memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan penuh potensi.

Kata Kunci: *stunting, pelayanan publik, kesehatan anak, kebijakan, gizi.*

Abstract

Stunting is still one of the most serious health problems in Indonesia. Not only because of the high number of cases which will reach 21.6% in 2022 but also because of the long-term impact on the quality of life of Indonesian children in the future. Stunting not only makes children shorter than they should be, but can also hinder brain development, reduce learning abilities, and reduce productivity as adults. In this context, public services play an important role. Through this literature review, the author tries to look more deeply at how public services from basic health services, nutrition education, to sanitation contribute to efforts to overcome stunting. The results show that challenges in the field are still large, ranging from limited resources, lack of equitable education, to coordination between institutions that is not yet optimal. However, there are also many opportunities that can be maximized, such as strengthening local human resources, digitizing services, and active community involvement. Learning from other countries such as Bolivia, North Korea and Sweden, Indonesia can adapt their various successful strategies with approaches that suit the local context. Ultimately, strong, inclusive and responsive public services are the key to reducing stunting rates and ensuring future generations grow up healthy and full of potential.

Keywords: *stunting, public services, child health, policy, nutrition.*

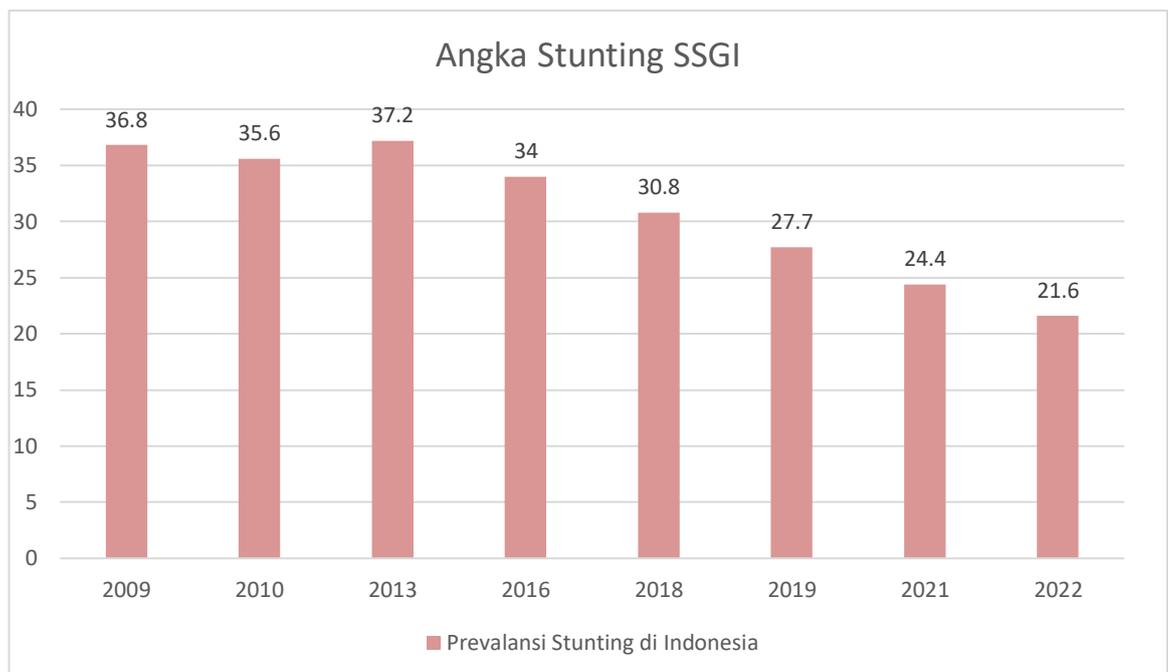
✉ Corresponding author : mtsip.42.3604@ipdn.ac.id

Email Address : mtsip.42.3604@ipdn.ac.id, tjenreng@gmail.com

Received 18 April 2025, Accepted 19 April 2025, Published 20 April 2025

PENDAHULUAN

Stunting masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang paling memprihatinkan di Indonesia. Kondisi ini terjadi ketika anak mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021). Dampaknya bukan hanya terlihat dari postur tubuh yang lebih pendek, tapi juga bisa memengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, hingga produktivitas di masa depan. Bahkan, hal ini dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.



Sumber data: Kemenkes RI

Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,6%. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seperempat dari anak-anak Indonesia yang berusia di bawah lima tahun mengalami pertumbuhan yang terhambat akibat kekurangan gizi. Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (pada 2013, prevalensi stunting mencapai 37,2%), angka ini masih belum sesuai target yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization), yaitu di bawah 20% pada tahun 2025.

Masalah stunting sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ia muncul dari rangkaian persoalan yang saling terkait dan kompleks, mulai dari akses terbatas terhadap layanan kesehatan, kondisi sanitasi yang kurang memadai, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, hingga ketahanan pangan yang belum merata. Oleh karena itu, upaya penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan intervensi medis atau pemberian gizi tambahan saja. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh melibatkan berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi agar penanggulangan stunting bisa dilakukan secara efektif.

Dalam hal ini, pelayanan publik memiliki peran penting dan strategis. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab untuk memastikan semua lapisan Masyarakat terutama kelompok yang paling rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak balita—mendapatkan akses yang layak terhadap layanan kesehatan dasar, informasi dan edukasi gizi, air bersih, serta lingkungan yang sehat dan aman. Kualitas pelayanan publik yang prima, dari perencanaan kebijakan hingga pelaksanaan di lapangan, akan sangat menentukan berhasil tidaknya upaya menurunkan angka stunting secara signifikan.

Sayangnya, di lapangan, masih banyak tantangan yang menghambat efektivitas pelayanan publik. Mulai dari keterbatasan tenaga dan anggaran, koordinasi antar lembaga yang belum solid, hingga partisipasi masyarakat yang masih rendah. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa kita perlu menggali lebih dalam tentang bagaimana pelayanan publik bisa dioptimalkan untuk menangani stunting secara strategis. Penguatan kapasitas lembaga, perbaikan tata kelola, serta reformasi birokrasi menjadi kunci untuk mendorong perubahan yang nyata.

Melalui kajian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih utuh mengenai peran pelayanan publik dalam menangani stunting di Indonesia. Lebih dari itu, kajian ini juga bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret, demi mempercepat pencapaian target nasional dalam menurunkan prevalensi stunting, dan pada akhirnya, meningkatkan kualitas hidup generasi masa depan bangsa.

METODOLOGI

Pada paper ini menggunakan jenis/pendekatan penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan (Mardalis, 1999) merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Stunting di Indonesia dan Tantangan Pelayanan Publik

Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan tren penurunan, yakni dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,6% pada tahun 2022 (SSGI), angka tersebut masih berada di atas standar WHO (<20%). Beberapa daerah masih mencatatkan angka stunting yang tinggi, terutama di

wilayah timur Indonesia dan daerah tertinggal, terluar, dan terpencil (3T). Detikdata.com menyatakan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT memiliki prevalensi stunting tertinggi di Indonesia, mencapai 37,8% pada tahun 2022. Bahkan, 15 kabupaten di NTT tercatat memiliki prevalensi stunting di atas 30%, dengan beberapa di antaranya melebihi 40%.

Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia (MCA Indonesia, 2013).

Permasalahan ini berkaitan erat dengan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam hal akses dan efektivitas program-program intervensi pemerintah. Masih ditemukan ketimpangan dalam distribusi layanan kesehatan, rendahnya kualitas sanitasi, serta kurangnya edukasi gizi di tingkat masyarakat. Selain itu, kapasitas birokrasi di tingkat lokal seringkali belum memadai untuk menjalankan program penanganan stunting secara optimal.

Selanjutnya menurut Agung kurniawan (2005:6), pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan.

Ratminto (2005) mendefinisikan bahwa Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, didaerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangkapelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel berikut menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang telah disaring dan dipilih dari sejumlah literatur terkait. Penelitian ini dipilih berdasarkan relevansi mereka terhadap topik penelitian yang mengkaji Pelayanan Publik sebagai Kunci Penanganan Stunting di Indonesia.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu yang terkait Pelayanan Publik sebagai Kunci Penanganan Stunting di Indonesia.

No.	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Marina Ery Setiyawati, Lusya Puri Ardhiyanti, Endah Nurhalimah Hamid, Ni Ayu	Studi Literatur: Keadaan Dan Penanganan Stunting Di Indonesia	Penanganan dan pencegahan stunting di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara seperti, Sun Up Nutrition (SUN), Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P), Pelatihan dan penyuluhan

	Tamariska Muliarta, Yasmin Jamil Raihanah (Ikraith- Humaniora, 2024)		tentang stunting oleh kader, dan kelas untuk ibu hamil untuk memperkuat pengetahuan mengenai stunting beserta dampaknya. Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa stunting masih menjadi masalah kesehatan global tidak terkecuali di Indonesia, pemerintah dan Kementerian Kesehatan masih terus mengupayakan agar angka stunting yang sempat turun pada tahun 2021, akan terus menurun di tahun-tahun berikutnya.
2.	Badiul Hadi (Action Research Literate, 2024)	Analisis Efektivitas Kebijakan Anggaran Program Penurunan Stunting di Indonesia	Meskipun kebijakan anggaran telah mengalami kemajuan dalam mengurangi stunting, masih ada tantangan yang signifikan dalam implementasi dan dampaknya secara efektif di tingkat lokal. Faktor-faktor seperti koordinasi antar sektor, alokasi anggaran yang tepat, dan partisipasi masyarakat menjadi krusial dalam menentukan keberhasilan kebijakan ini. Studi ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika implementasi kebijakan anggaran untuk penurunan stunting dan menyarankan strategi untuk meningkatkan efektivitasnya di masa mendatang.
3.	Silvia Anggraini, Muthmainnah, Nurul Septiani, Tomy Suganda (Sehati, 2024)	Strategi Intervensi Penanganan Stunting di Indonesia: Studi Literatur	Strategi Intervensi pencegahan stunting di Indonesia harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mengedepankan pendekatan preventif, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat. Dengan memperkuat komitmen pemerintah dan kolaborasi lintas sektor yang inovatif,

			diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan stunting secara berkelanjutan.
--	--	--	---

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penanganan stunting di Indonesia merupakan bagian dari pelayanan publik, yang dalam hal ini masih terdapat kendala dan tantangan, sehingga diperlukan strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menurunkan angka prevalensi stunting.

2. Peran Strategis Pelayanan Publik dalam Penanganan Stunting

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, percepatan penurunan stunting dilakukan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. selanjutnya dalam rangka percepatan penurunan stunting ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.

Masalah stunting tidak hanya berkaitan dengan kekurangan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi, pendidikan, dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antar sektor sangat diperlukan. Pelayanan publik menjadi kunci dalam pengentasan stunting melalui beberapa aspek penting, diantaranya yaitu:

- a. **Layanan Kesehatan Terpadu:** Posyandu, Puskesmas, dan layanan kesehatan ibu dan anak (KIA) merupakan ujung tombak pelayanan publik di tingkat akar rumput. Strategi yang diterapkan mencakup intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita. Sedangkan intervensi gizi sensitif, seperti perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Keberadaan dan kualitas layanan ini sangat berpengaruh terhadap pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi gizi, serta pencegahan penyakit. Menurut Kementerian Kesehatan, pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat merupakan salah satu strategi utama dalam percepatan penurunan stunting.
- b. **Koordinasi Lintas Sektor:** Penanganan stunting melibatkan kerja sama lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum (untuk air bersih dan sanitasi), hingga pemerintah desa. Pelayanan publik yang bersifat kolaboratif dan terintegrasi terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan sektoral yang parsial. Sebagai contoh, di Kalimantan Selatan, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Ketahanan Pangan untuk memastikan ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, dan pangan bergizi bagi masyarakat
- c. **Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah:** Daerah yang berhasil menurunkan stunting secara signifikan umumnya memiliki kepemimpinan yang kuat, komitmen anggaran, serta inovasi pelayanan publik, seperti pemanfaatan

aplikasi digital untuk memantau status gizi anak. Menurut Pusdeka UNU Yogyakarta, penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui komitmen kepemimpinan dan inovasi program menjadi kunci dalam percepatan penurunan stunting.

3. Tantangan dalam pelaksanaan penanganan stunting.

Penanganan stunting di Indonesia masih banyak menghadapi kendala, diantaranya yaitu:

- a. Ketimpangan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil, keterbatasan infrastruktur sanitasi, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di wilayah terpencil. Banyak daerah yang masih kekurangan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan sarana pendukung seperti tablet tambah darah dan makanan tambahan, sehingga intervensi tidak dapat menjangkau seluruh sasaran.
- b. Kurangnya edukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola asuh yang baik. Banyak keluarga, terutama di kalangan masyarakat miskin dan rentan miskin, belum sepenuhnya memahami dampak stunting terhadap perkembangan anak dan pentingnya pemenuhan gizi selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Edukasi dan kampanye nasional yang dilakukan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata.
- c. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi pendanaan maupun kapasitas institusi, menjadi hambatan dalam mempercepat implementasi kebijakan. Program-program yang diperlukan untuk mencapai target tersebut, seperti pemberian makanan tambahan, imunisasi, serta peningkatan akses air bersih dan sanitasi, membutuhkan anggaran yang cukup besar dan distribusi yang merata. Namun, keterbatasan dana dan ketidaktepatan alokasi di beberapa daerah menyebabkan program tidak dapat berjalan optimal, terutama di daerah terpencil dengan angka stunting yang tinggi. Hal ini juga disampaikan oleh Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, bahwa anggaran stunting lebih banyak digunakan untuk perjalanan dinas, rapat, dan berbagai pengeluaran birokratis proyek sehingga belum sepenuhnya efektif.
- d. Belum optimalnya program Water Sanitation and Hygiene (WASH).
- e. Pengintegrasian data berbasis keluarga yang mendukung pemantauan dan evaluasi program secara menyeluruh di Indonesia. Data yang akurat dan terintegrasi dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi gizi, kesehatan, dan faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi stunting di tingkat keluarga.

4. Beberapa contoh Penanganan Stunting di Negara lain.

Penanganan Stunting di Negara lain, antara lain:

a. Bolivia

Bolivia menerapkan kebijakan kampanye pentingnya pemberian ASI eksklusif kepada bayi, dilengkapi makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang telah terfortifikasi. Bolivia juga mengkampanyekan pertanian keluarga untuk memastikan ketersediaan sayuran dan protein bagi ibu dan anak, serta memperkuat program Water Sanitation and Hygiene (WASH). Berkat langkah-

langkah tersebut, Bolivia berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 2,5 persen per tahun.

b. Korea Utara

Korea Utara memberikan contoh lain dengan program konsumsi protein hewani melalui kampanye konsumsi satu telur per hari. Selain itu, pemerintah menyediakan dukungan berupa vitamin A, obat cacing, dan bubuk vitamin taburia kepada ibu yang memiliki bayi usia 6–23 bulan, yang dilakukan dua kali dalam setahun. Langkah ini membantu memastikan asupan nutrisi yang memadai bagi bayi dan balita.

c. Swedia

Swedia menerapkan sistem kesehatan yang sangat mendukung pencegahan stunting dengan menyediakan layanan kesehatan universal dan perawatan gizi yang komprehensif. Pemerintah Swedia menyediakan pemeriksaan kesehatan yang teratur bagi ibu hamil dan anak, serta edukasi mengenai nutrisi dan pola makan sehat dengan menerapkan kebijakan "Första Lådan" yaitu, menyediakan dukungan kepada orang tua baru dengan memberi mereka informasi tentang cara merawat dan memberikan makanan sehat bagi bayi.

Indonesia dapat mengadopsi kebijakan yang telah diambil oleh negara-negara tersebut dalam menangani stunting, seperti Bolivia, Korea Utara, dan Swedia, dengan menyesuaikan kebijakan dan strategi sesuai dengan kebutuhan lokal. Salah satu langkah utama yang perlu diambil adalah meningkatkan akses terhadap gizi yang memadai, khususnya untuk ibu hamil, balita, dan anak-anak. Program pemberian makanan tambahan yang terfortifikasi dan program pertanian keluarga yang dapat menjadi solusi untuk memastikan ketersediaan makanan bergizi. Selain itu, kebijakan yang dapat diadopsi yaitu dengan melakukan kampanye pentingnya pemberian ASI eksklusif, pemenuhan gizi yang baik melalui makanan pendamping ASI (MP-ASI), serta pendidikan gizi yang lebih masif di seluruh lapisan masyarakat yang bertujuan untuk membantu memastikan asupan nutrisi yang memadai bagi bayi dan balita.

5. Penguatan Sektor Pelayanan Publik dalam Penanganan Stunting

Dalam menghadapi persoalan stunting yang begitu kompleks, pelayanan publik menjadi salah satu garda terdepan. Namun, untuk benar-benar memberikan dampak yang nyata, pelayanan publik perlu diperkuat dari berbagai sisi. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan:

a. Peningkatan kapasitas SDM pelayanan publik di tingkat lokal

Orang-orang yang bekerja di lapangan seperti kader Posyandu, petugas Puskesmas, bidan desa, hingga perangkat pemerintahan setempat adalah aktor utama yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Mereka adalah wajah dari pelayanan publik itu sendiri. Oleh karena itu, penting sekali untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Pelatihan yang rutin, dukungan teknis, dan pembekalan tentang isu gizi dan kesehatan anak akan sangat membantu mereka dalam menjalankan peran secara optimal. Semakin siap SDM di lapangan, semakin besar pula peluang untuk menurunkan angka stunting di masyarakat.

b. Digitalisasi sistem layanan dan pemantauan stunting

Di era sekarang, teknologi bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk dalam pemantauan tumbuh kembang anak. Melalui aplikasi atau sistem digital, data mengenai kondisi gizi anak bisa dikumpulkan dan dianalisis dengan cepat dan akurat. Hal ini juga memudahkan lintas sektor untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data. Selain itu, digitalisasi membuat proses pemantauan lebih transparan dan efisien, serta mempercepat respons bila ditemukan kasus yang membutuhkan penanganan segera.

c. Peningkatan alokasi anggaran berbasis kinerja

Setiap rupiah yang digunakan untuk program penanganan stunting harus benar-benar berdampak. Pendekatan anggaran berbasis kinerja bukan hanya soal membelanjakan dana, tetapi juga soal melihat hasil dari setiap intervensi yang dilakukan. Daerah yang mampu menunjukkan penurunan angka stunting karena program-program efektif, misalnya, seharusnya mendapatkan dukungan lebih besar. Dengan begitu, pengelolaan anggaran menjadi lebih adil, tepat sasaran, dan mendorong semangat inovasi di tingkat lokal.

d. Pemberdayaan masyarakat sebagai mitra aktif dalam pelayanan

Masyarakat bukan hanya penerima manfaat, tapi juga bisa menjadi bagian dari solusi. Ketika masyarakat diberdayakan dengan pengetahuan, keterlibatan, dan ruang untuk bersuara maka penanganan stunting bisa berjalan lebih efektif. Misalnya, ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok dasawisma bisa menjadi agen perubahan dalam hal pola asuh dan gizi anak. Tokoh masyarakat juga bisa ikut serta menyebarkan pesan-pesan kesehatan yang sesuai dengan nilai lokal. Dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra, program stunting akan lebih membumi dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Stunting masih menjadi tantangan serius dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Masalah ini bukan hanya soal gizi, tetapi juga mencerminkan sejauh mana pelayanan publik mampu menjangkau dan melayani masyarakat secara adil dan merata. Pelayanan publik yang berkualitas dari layanan kesehatan, edukasi gizi, sanitasi yang memadai, hingga pemberdayaan masyarakat merupakan kunci penting dalam memutus mata rantai stunting.

Pengalaman dari berbagai negara seperti Bolivia, Korea Utara, dan Swedia menunjukkan bahwa komitmen kuat dari pemerintah, sistem layanan dasar yang tangguh, serta edukasi masyarakat yang menyeluruh, mampu menurunkan angka stunting secara signifikan. Indonesia memiliki peluang besar untuk belajar dari praktik-praktik tersebut, dengan tentu saja menyesuaikan strategi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Oleh karena itu, dibutuhkan kerja keras yang berkelanjutan untuk memperkuat pelayanan publik mulai dari peningkatan kapasitas birokrasi di tingkat daerah, pemanfaatan teknologi digital, hingga koordinasi lintas sektor yang lebih solid. Yang tak kalah penting, partisipasi aktif dari masyarakat juga harus terus didorong. Bila semua elemen ini berjalan dengan baik, Indonesia akan lebih cepat dan mantap dalam menurunkan angka stunting, menuju generasi yang lebih sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan.

Referensi:

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung.
- Anggraini, Muthmainnah, Nurul Septiani, Tomy Suganda. 2024. *Strategi Intervensi Penanganan Stunting di Indonesia: Studi Literatur Silvia* (jurnal Sehati)
- Badiul Hadi. 2024. *Analisis Efektivitas Kebijakan Anggaran Program Penurunan Stunting di Indonesia*, (Action Research Literate)
- Mardalis, 1999 dalam Aris Dwi Cahyono, 2021 “Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas” (Jurnal Ilmiah Pamenang)
- Marina Ery Setiyawati, Lusya Puri Ardhiyanti, Endah Nurhalimah Hamid, Ni Ayu Tamariska Muliarta, Yasmin Jamil Raihanah. 2024. *Studi Literatur: Keadaan Dan Penanganan Stunting Di Indonesia* (Ikraith-Humaniora)
- Picciotto, R. G. (2005). *Good Governance and Service Delivery*. The World Bank.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- <https://seknasfitra.org/penyelesaian-kasus-stunting-tidak-sesuai-target/>
- <https://detikdata.com/prevalensi-stunting-15-kabupaten-di-ntt-tinggi/>